

SKRIPSI

**PENGAWASAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI OLEH DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KOTA PADANG**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam
rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

LISA YULIYANTI

1910113068

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK VII)



Pembimbing :

Frenadin Adegustara,S.H., M.S

Gusminarti,S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

**PENGAWASAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI OLEH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KOTA
PADANG**

*(Lisa Yuliyanti, 1910113068, Program Kekhususan Hukum Administrasi
Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 65 halaman, Tahun 2023)*

ABSTRAK

Setelah adanya perubahan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 terhadap Peraturan Menteri dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, perizinan usaha koperasi simpan pinjam di Indonesia menjadi lebih mudah. Dengan kemudahan tersebut diharapkan terciptanya koperasi yang sehat sehingga diperlukan pengawasan yaitu berupa sistem *Online Single Submission* atau OSS. Namun dalam pelaksanaannya, pengawasan izin usaha simpan pinjam di Kota Padang belum berjalan dengan baik serta masih terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan perizinan usaha simpan pinjam koperasi dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan izin usaha simpan pinjam koperasi di Kota Padang berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 terhadap Peraturan Menteri dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara *in action*. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan maka diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pengawasan izin usaha simpan pinjam koperasi belum berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dengan berbagai kendala baik secara yuridis maupun non yuridis.

**Kata kunci : Pengawasan, Perizinan usaha simpan pinjam koperasi,
Koperasi**

